

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kondisi inflasi di Kabupaten Wonosobo sepanjang **Triwulan 3 tahun 2025** menunjukkan dinamika yang menarik. Secara umum, laju kenaikan harga di daerah ini masih berada dalam koridor yang sehat dan terkendali, meskipun terdapat tekanan dari beberapa sektor tertentu yang perlu diwaspadai.

Dinamika Harga dan Komoditas Utama

Selama periode Juli hingga September 2025, Wonosobo mencatatkan angka inflasi tahunan yang bergerak stabil di angka **2,36% hingga 2,72%**. Kelompok pengeluaran yang paling dominan memberikan andil inflasi adalah sektor **makanan, minuman, dan tembakau**.

Pada kategori pangan, komoditas seperti bawang merah, buncis, dan sawi putih sempat mengalami kenaikan harga yang cukup terasa bagi masyarakat. Hal ini dipicu oleh faktor musiman dan kendala distribusi di tingkat lokal. Sebaliknya, komoditas utama seperti **beras dan minyak goreng** cenderung stabil berkat intervensi pemerintah melalui penyaluran beras SPHP dan pemantauan stok yang ketat di pasar-pasar besar seperti Pasar Induk Wonosobo.

Menariknya, salah satu penyumbang inflasi non-pangan terbesar pada triwulan ini justru datang dari **emas perhiasan**. Kenaikan harga emas global berdampak langsung pada indeks harga konsumen di daerah, mengingat komoditas ini masih menjadi instrumen investasi favorit masyarakat Wonosobo. Di sisi lain, kelompok jasa perawatan pribadi juga menunjukkan tren kenaikan biaya yang konsisten.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kerentanan Sektor Agraris terhadap Faktor Eksternal

Permasalahan utama berakar pada karakteristik Wonosobo sebagai daerah produsen hortikultura. Pada periode Juli hingga September 2025, terjadi ketidakpastian iklim yang mengganggu siklus tanam di wilayah dataran tinggi. Hal ini menyebabkan pasokan sayur-mayur seperti cabai dan bawang merah menjadi sangat fluktuatif. Masalah diperparah oleh lonjakan harga input pertanian, khususnya pupuk nonsubsidi dan pestisida, yang memaksa petani menaikkan harga di tingkat ladang demi menjaga margin keuntungan, sehingga memicu tekanan inflasi dari sisi penawaran (*cost-push inflation*).

2. Efisiensi Rantai Pasok dan Kendala Geografis

Secara struktural, distribusi barang di Wonosobo masih terbentur pada panjangnya rantai pasar dari petani hingga ke konsumen akhir. Ketergantungan pada makelar atau tengkulak membuat harga di pasar ritel seringkali tidak mencerminkan harga asli di tingkat produsen. Selain itu, kondisi topografi Wonosobo yang berbukit meningkatkan risiko biaya logistik. Pada akhir triwulan, ketika curah hujan mulai meningkat, aksesibilitas transportasi di beberapa jalur distribusi kecamatan menjadi terhambat, yang secara instan memicu kelangkaan stok sementara dan kenaikan harga di pasar-pasar lokal.

3. Tekanan dari Komoditas Non-Pangan dan Global

Wonosobo juga menghadapi permasalahan unik terkait perilaku investasi masyarakatnya. Pada Triwulan 3-2025, kenaikan harga emas global menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi di daerah ini. Budaya masyarakat lokal yang menjadikan emas perhiasan sebagai aset simpanan utama membuat indeks harga pada kelompok perawatan pribadi melonjak tajam. Di sisi lain, kenaikan biaya transportasi akibat penyesuaian harga energi secara nasional turut memberikan efek domino terhadap harga barang-barang kebutuhan pokok yang harus didatangkan dari luar daerah.

4. Tantangan Digitalisasi dan Validasi Data

Dari sisi manajerial, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masih menghadapi kendala dalam integrasi data pangan secara *real-time*. Seringkali terdapat kesenjangan antara data luas panen yang tercatat secara administratif dengan ketersediaan fisik barang di pasar-pasar utama seperti Pasar Induk Wonosobo. Ketimpangan informasi ini menyebabkan langkah intervensi, seperti Operasi Pasar atau Gerakan Pangan Murah, terkadang terlambat dilakukan atau tidak tepat sasaran, sehingga ekspektasi inflasi di masyarakat sulit diredam dengan cepat.

5. Lemahnya Kerja Sama Antar-Daerah (KAD)

Permasalahan terakhir berkaitan dengan sinergi kewilayahan. Meskipun Wonosobo merupakan daerah surplus untuk beberapa komoditas sayuran, namun belum adanya kontrak kerja sama yang mengikat dengan daerah tetangga yang mengalami defisit seringkali membuat aliran barang lebih banyak terserap ke kota-kota besar di luar provinsi. Hal ini menyebabkan stok lokal terkadang menipis dan harga di dalam Wonosobo sendiri justru ikut terkerek naik mengikuti tren harga nasional.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Wonosobo pada Triwulan 3 tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan integratif yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan lokal dan mitigasi dampak kenaikan harga global. Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) secara intensif.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Efektivitas Intervensi Harga (Gerakan Pangan Murah)

Kebijakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar dinilai sangat efektif dalam menjaga stabilitas harga beras dan minyak goreng.

- Keberhasilan: Penyaluran beras SPHP berhasil meredam dampak kenaikan harga gabah di tingkat nasional, sehingga harga beras di Wonosobo tetap stabil di bawah harga eceran tertinggi (HET).

- Catatan Evaluasi: Meskipun efektif di wilayah perkotaan, jangkauan GPM di wilayah perdesaan yang jauh dari pusat keramaian dinilai masih kurang merata. Frekuensi kegiatan perlu ditambah untuk wilayah-wilayah dengan akses logistik sulit.

2. Penanganan Komoditas *Volatile Food* (Sayur dan Cabai)

Kebijakan di sektor hortikultura dinilai cukup efektif namun rentan.

- Keberhasilan: Program bantuan saprodi (sarana produksi) membantu petani menjaga produktivitas di tengah cuaca yang tidak menentu.
- Kegagalan/Hambatan: Upaya pengendalian harga cabai dan bawang merah masih sering kalah oleh hukum pasar. Karena Wonosobo adalah produsen besar, ketika harga nasional melonjak, stok lokal cenderung tersedot ke luar daerah (Jakarta/Semarang), sehingga harga di pasar domestik Wonosobo tetap ikut naik tinggi.
- Rekomendasi: Perlu adanya regulasi atau kesepakatan lebih kuat dengan kelompok tani untuk memastikan "cadangan pangan lokal" terpenuhi sebelum komoditas dikirim ke luar daerah.

3. Peran BUMD sebagai *Off-taker*

Evaluasi terhadap peran BUMD sebagai penyerap hasil panen menunjukkan hasil yang belum optimal.

- Kendala: Kapasitas gudang dan kemampuan permodalan BUMD dalam menyerap hasil panen petani saat harga anjlok masih terbatas. Hal ini menyebabkan rantai distribusi masih didominasi oleh tengkulak besar yang memiliki kendali penuh atas harga pasar.
- Rekomendasi: Penguatan modal BUMD dan pembangunan gudang pendingin (*cold storage*) sangat mendesak agar komoditas seperti cabai dapat disimpan lebih lama saat surplus.

4. Akurasi Data dan Digitalisasi (SiHaTi)

Pemanfaatan Sistem Informasi Harga Tinggi (SiHaTi) atau aplikasi pemantau harga lainnya menunjukkan peningkatan kualitas data.

- Keberhasilan: Kecepatan pelaporan harga dari pasar-pasar utama meningkat, memungkinkan TPID merespons lonjakan harga lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
- Catatan Evaluasi: Validitas data di tingkat pedagang eceran terkadang berbeda dengan data yang dilaporkan petugas. Masih ditemukan selisih harga antara pasar besar dengan pasar desa yang cukup signifikan (mencapai 5-10%).

5. Pengaruh Faktor Non-Pangan (Emas dan Jasa)

Kebijakan pengendalian inflasi dinilai kurang berdaya menghadapi inflasi dari kelompok emas perhiasan

dan jasa.

- Analisis: TPID memiliki keterbatasan instrumen untuk mengendalikan harga emas yang mengikuti harga global. Inflasi di sektor ini hanya bisa diredam melalui komunikasi publik agar masyarakat tidak terlalu konsumtif pada barang non-pokok.
- Keberhasilan: Namun, kebijakan pemantauan tarif transportasi lokal berhasil mencegah kenaikan tarif angkutan yang sepihak, sehingga inflasi sektor transportasi tetap terkendali.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga: Transformasi Intervensi Pasar

- Subsidi Transportasi Komoditas: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mensubsidi biaya angkut bahan pangan pokok dari produsen ke pasar ritel saat terjadi lonjakan harga energi atau hambatan logistik cuaca.
- Optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) Keliling: Mengubah pola GPM dari statis (di alun-alun) menjadi dinamis (menggunakan armada kendaraan) untuk menjangkau wilayah pedesaan yang memiliki akses terbatas ke pasar utama.

2. Ketersediaan Pasokan: Penguatan Hulu dan Pasca-Panen

- Pembangunan *Cold Storage* (Gudang Pendingin): Mengingat Wonosobo adalah produsen hortikultura, keberadaan *cold storage* milik daerah sangat mendesak. Fasilitas ini berfungsi untuk menyimpan stok cabai dan sayuran saat panen raya guna dilepaskan kembali ke pasar saat pasokan menipis (mengatur *supply and demand*).
- Penguatan Peran BUMD Pangan sebagai *Off-taker*: Memberikan penugasan dan suntikan modal kepada BUMD untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak saat harga jatuh, sehingga petani tetap memiliki modal untuk menanam kembali.

3. Kelancaran Distribusi: Digitalisasi dan Logistik

- Integrasi Logistik Pangan: Membangun platform digital "Pasar Tani Online" yang menghubungkan kelompok tani langsung dengan pedagang ritel di pasar atau konsumen besar (seperti hotel dan restoran) untuk memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang.
- Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Tidak hanya sekadar nota kesepahaman (MoU), KAD harus ditingkatkan menjadi perjanjian kerja sama konkret terkait *pooling*

komoditas, di mana daerah surplus menyuplai daerah defisit secara terjadwal.

4. Komunikasi Efektif: Manajemen Ekspektasi Masyarakat

- Iklan Layanan Masyarakat "Belanja Bijak": Kampanye masif melalui media sosial dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi warga agar tidak melakukan *panic buying* dan beralih ke komoditas substitusi jika harga barang tertentu melonjak.
- Transparansi Harga Real-Time: Memasang *running text* harga pangan di titik-titik strategis kota agar masyarakat mengetahui harga acuan dan tidak mudah dipermainkan oleh spekulan.